

---

## PENGARUH BELANJA MODAL, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN KOTA PROPINSI LAMPUNG

**Fajar Aribowo**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YKP" Yogyakarta  
[fajar910@gmail.com](mailto:fajar910@gmail.com)

---

### ABSTRACT

*This study aims to identify the influence of capital spending, economic growth, and the general allocation of revenue. Revenue is the main source of local revenue that has a very important role in the regional economy.*

*The data used in this study is secondary data sourced from the Report of Actual Revenue and Expenditure Budget (APBD) The Government of Regency / City in the province of Lampung. Analysis tool in the study were multiple linear regression with the help of SPSS software version 16. Sampling method used is purposive sampling. Study sample of 10 District / Town from 2004 until 2009.*

*Based on the results of this study indicate that the Capital Expenditure and the General Allocation Fund did not significantly affect local revenue while economic growth significantly affect local revenue.*

**Keywords:** *Capital Expenditures, Economic Growth, and the General Allocation Fund Revenue.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan alokasi pendapatan secara umum. Pendapatan adalah sumber utama pendapatan lokal yang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah.*

*Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Anggaran Belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung. Alat analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 16. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel penelitian dari 10 Kabupaten / Kota dari tahun 2004 hingga 2009.*

*Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah.*

**Kata kunci:** *Pengeluaran Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Dana Alokasi Umum.*

## **PENDAHULUAN**

Belanja modal daerah sangat berpengaruh terhadap kesempatan investasi bagi daerah. Asumsinya adalah belanja modal dapat meningkatkan PAD yang diikuti adanya pertumbuhan ekonomi sebagai bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. PAD merupakan indikator untuk mengukur kemandirian daerah. (Septian, 2008)

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (2005). Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD. (David dan Adi, 2007).

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi

daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Wewenang daerah mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan dan pengelolaan sumber daya didalamnya serta menjaga dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka kesatuan yang mencakup pembagian, pemerataan secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah yang sejalan dengan kewajiban dan pembagian wewenang, termasuk pengelolaan dan pengawasan. Dana perimbangan merupakan aspek penting dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, serta merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Masing-masing daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda, baik sumber daya alamnya maupun tingkat kecerdasan sumber daya manusianya, sehingga mengakibatkan daerah kaya tambah kaya dan sebaliknya daerah miskin menjadi lebih miskin atau dapat disimpulkan masalah perimbangan keuangan pusat-daerah merupakan masalah yang syarat dengan muatan ketatanegaraan, politik, sosial budaya, ekonomi dan administrasi Negara secara keseluruhan.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi

pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama.

## **KAJIAN TEORI**

### **Belanja Modal**

Belanja modal (Syaiful, 2006) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Halim (2004a:73) Belanja modal merupakan belanja pemerintahan daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama :

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan disbanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak meningkat.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli daerah (PAD) menurut Simanjuntak (2001) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Bab V tentang Pendapatan Asli Daerah pasal 6 disebutkan ayat (1) PAD bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Bagian laba usaha daerah
4. Lain-lain PAD

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perkonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai Perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik. PAD idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah.

### **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan penambahan barang dan jasa dalam masyarakat yang diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (Sukirno, 2004). Keberhasilan upaya pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh adanya perencanaan yang didukung oleh informasi dari hasil kajian berbagai data dan indikator sosial ekonomi. Salah satu indikator ekonomi yang lazim digunakan untuk keperluan tersebut adalah Statistik Pendapatan Regional atau yang lebih dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu.

### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk memadai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU yang merupakan transfer Pemerintah Pusat bersifat "*block grant*" yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah (Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran dan Perimbangan Keuangan).

### **Hipotesis**

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Belanja Modal berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H<sub>2</sub>: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data keuangan pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung tahun 2004-2009. Data keuangan tersebut antara lain belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. Data yang diambil berasal dari Biro Pusat Statistik propinsi Lampung.

Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung jumlahnya ada 14 Kabupaten/Kota, yaitu seperti yang disajikan berikut ini:

NO	NAMA KABUPATEN
1	Kabupaten Lampung Barat
2	Kabupaten Tanggamus
3	Kabupaten Lampung Selatan
4	Kabupaten Lampung Timur
5	Kabupaten Lampung Tengah
6	Kabupaten Lampung Utara
7	Kabupaten Way Kanan
8	Kabupaten Tulang Bawang
9	Kabupaten Pesawaran
10	Kabupaten Mesuji
11	Kabupaten Pringsewu
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat
13	Kota Metro
14	Kota Bandar Lampung

Penentuan sampel penelitian menggunakan *Purposive Sampling* yaitu dengan cara menunjukkan langsung pada suatu populasi berdasarkan karakteristik atau ciri yang memiliki sampel, dengan tujuan agar diperoleh sampel yang representatif sampai dengan 2 kriteria yang ditentukan, adapun kriteria pemilihan sampel adalah:

1. Bukan merupakan kabupaten baru terhitung tahun 2004-2009
2. Mempunyai Laporan Keuangan secara lengkap dari tahun 2004-2009

Dari 14 kabupaten yang ada di propinsi Lampung ada 10 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria sampel penelitian, yaitu:

NO	NAMA KABUPATEN
1	Kabupaten Lampung Barat
2	Kabupaten Tanggamus
3	Kabupaten Lampung Selatan
4	Kabupaten Lampung Timur
5	Kabupaten Lampung Tengah
6	Kabupaten Lampung Utara
7	Kabupaten Way Kanan
8	Kabupaten Tulang Bawang
9	Kota Metro
10	Kota Bandar Lampung

Dari kedua kriteria diatas ada 4 kabupaten yang tidak bisa digunakan sebagai sampel penelitian ini, seperti yang disajikan sebagai berikut:

NO	NAMA KABUPATEN	TAHUN PEMEKARAN
1	Kabupaten Pesawaran	2009
2	Kabupaten Mesuji	2006
3	Kabupaten Pringsewu	2009
4	Kabupaten Tulang Bawang Barat	2009

### Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel Terikat (*Dependen*)

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Simanjuntak (2001) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Variabel Bebas (*Independen*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

1. Belanja modal
2. Pertumbuhan Ekonomi



### 3. Dana Alokasi Umum (DAU)

#### TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisa data menggunakan:

#### Regresi Linier Berganda

Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat mengenai perubahan dari setiap peningkatan dan penurunan variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Bentuk persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = pendapatan asli daerah  
a = konstanta  
b = koefisien regresi  
X<sub>1</sub> = belanja modal  
X<sub>2</sub> = pertumbuhan daerah  
X<sub>3</sub> = dana alokasi umum  
e = error

#### Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda ini dilakukan dengan uji asumsi klasik sehingga persamaan garis regresi yang diperoleh benar-benar dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan model Kolmogrov-Smirnov. Model regresi berdistribusi normal atau tidak, jika nilai sig pada uji Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka data dikatakan berdistribusi normal dan jika Kolmogrov-Smirnov lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka data dikatakan tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2009).

## 2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji mengenai adanya hubungan antar anggota-anggota sampel pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu. Pengujian autokorelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi diantara pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan penaksir mempunyai varians tidak minimum dan uji-t tidak dapat digunakan karena akan memberikan kesimpulan yang salah. Untuk mengetahui apakah model regresi linear berganda yang dihasilkan tidak terjadi autokorelasi, dilakukan uji *Durbin-Watson* (uji DW) dengan kriteria jika  $d_u < d < 4 - d_u$  maka tidak ada autokorelasi positif (Ghozali, 2009).

## 3. Uji Multikolinearitas

Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *Tolerance*  $> 0,10$  dan *VIP* (*Variance Inflation Factor*)  $< 10$ , maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Jika nilai *Tolerance*  $> 0,10$  dan *VIP* (*Variance Inflation Factor*)  $> 10$ , maka dapat diartikan bahwa terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2009).

## 4. Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas yaitu dengan melihat grafik *scatterplot*. Apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2009).

## **PENGUJIAN HIPOTESA**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari variabel independen (belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum) terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah).

### **Uji F (Anova)**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum) yang diamati secara bersama-sama berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen

(pendapatan asli daerah). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji F (ANOVA) pada tingkat keyakinan 95% dan  $\alpha = 0,05$  (5%). Dasar pengambilan keputusan:

1.  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
2.  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
3. nilai signifikansi (Sig.)  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
4. nilai signifikansi (Sig.)  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### **Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varian variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen (Ghozali, 2009).

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan varian variabel dependen. Bila terdapat nilai *adjusted*  $R^2$  bernilai negatif, maka *adjusted*  $R^2$  dianggap nol.

### **Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)**

Uji hipotesis secara parsial dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji-t pada tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5% dengan ketentuan:

1.  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
2.  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
3. nilai signifikansi (Sig.)  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
4. nilai signifikansi (Sig.)  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan sebagai gambaran awal alokasi Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum maupun Pendapatan Asli Daerah. Dari Analisis ini dapat kita lihat nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan deviasi standar dari masing-masing Kabupaten/Kota.

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	60	27.973.407	273.508.343	99.510.630	59.470.865
PDRB	60	520.652	17.067.998	5.247.000	3.579.132
DAU	60	122.427.811	669.111.784	364.193.913	149.549.302
PAD	60	2.309.951	70.432.263	17.822.988	13.979.780
Valid N (listwise)	60				

Output tampilan SPSS menunjukkan jumlah sampel (n) ada 60, yaitu terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota selama enam tahun (2004-2009). Tabel deskriptif ini memberikan informasi bahwa nilai minimum Belanja Modal sebesar Rp. 27.973.407.000 dan nilai maximum Rp.273.508.343.000 sedangkan mean sebesar Rp. 99.510.630.000 dan standar deviasi Rp. 59.470.865.000. Untuk PDRB nilai maximum sebesar Rp. 17.067.998.000 dan nilai minimum sebesar Rp. 520.652.000 sedangkan mean sebesar Rp. 5.247.000.000 dan standar deviasi sebesar Rp. 3.579.132.000. Dana Alokasi Umum nilai maximum sebesar Rp. 669.111.784.000 dan nilai minimum sebesar Rp. 122.427.811.000 sedangkan nilai mean sebesar Rp. 364.193.913.000 dan standar deviasi sebesar Rp. 149.549.302.000 Pendapatan Asli Daerah nilai maximum sebesar Rp. 70.432.263.000 dan nilai minimum sebesar Rp. 2.309.951.000 sedangkan mean sebesar Rp. 17.822.988.000 dan standar deviasi nya sebesar Rp. 13.979.780.000.

### Belanja Modal

Berikut ini rata-rata Belanja Modal tiap daerah di propinsi Lampung digambarkan melalui table dibawah ini:

#### Belanja Modal tahun 2004-2009

##### Dalam (Rp.000)

Kab/kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009
----------	------	------	------	------	------	------

Lambar	34.139.399	53.329.665	107.531.036	169.404.305	124.636.596	107.218.000
Lamteng	39.004.143	34.353.621	97.428.830	135.519.494	92.605.311	36.219.289
Lamut	27.973.407	49.826.094	159.091.044	145.091.262	180.747.085	139.285.671
Lamtim	60.960.162	43.413.182	105.783.814	188.747.149	150.893.126	80.624.882
Lamsel	30.112.646	30.056.266	72.171.989	273.396.936	141.024.433	119.585.005
Tanggamus	43.617.720	50.417.095	128.945.220	188.250.147	82.350.637	66.434.386
Way Kanan	56.304.980	37.460.514	82.126.057	156.694.459	209.848.330	273.508.343
Tuba	61.139.046	60.407.733	119.607.994	178.490.837	156.671.857	152.642.816
B.Lampung	43.752.299	55.705.420	107.211.466	111.875.364	111.875.364	82.299.630
Metro	30.183.467	29.506.040	49.174.515	69.125.521	64.410.132	80.426.594

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata dari tahun 2004 sampai 2009 setiap kabupaten/kota mengalami naik turun belanja modal. Dua tahun berturut-turut (tahun 2004-2005) Kabupaten Tulang Bawang memperoleh nilai tertinggi sebesar Rp. 61.139.046.000 dan Rp. 60.407.733.000, tahun 2006 diperoleh kabupaten Lampung Utara Rp. 159.091.044.000, tahun 2007 oleh kabupaten Lampung Selatan Rp. 273.396.936.000, tahun 2008 diperoleh kabupaten Way Kanan Rp. 209.848.330.000 dan tahun 2009 kembali diperoleh oleh kabupaten Tulang Bawang dengan nilai Rp. 152.642.816.000.

Sedangkan nilai terendah pada tahun 2004 diperoleh Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 27.973.407.000, sedangkan Kota Metro dari tahun 2005 sampai tahun 2008 memiliki nilai terendah hal ini disebabkan terjadinya perbedaan kebutuhan, perbedaan kelayakan dan keterbatasan fasilitas umum pada tahun 2009 kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 36.219.289.000.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Berikut ini terdapat tabel yang menggambarkan rata-rata Pertumbuhan ekonomi (PDRB).

#### **PDRB tahun 2004-2009**

**Dalam (Rp.000)**

Kab/kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009
----------	------	------	------	------	------	------

Lambar	1.272.543	1.394.094	1.551.745	1.886.393	2.252.210	2.527.773
Lamteng	5.789.666	6.466.700	7.669.657	9.193.036	11.092.671	13.635.156
Lamut	3.031.164	3.464.290	3.927.043	4.862.755	5.977.331	7.111.438
Lamtim	4.980.117	5.897.732	6.462.747	7.157.048	8.177.978	8.958.866
Lamsel	5.187.991	5.792.807	5.166.681	6.350.930	7.556.150	9.108.034
Tanggamus	3.092.627	3.439.910	3.967.143	4.785.848	5.701.083	4.167.827
Way Kanan	1.300.326	1.452.269	1.645.637	1.932.848	2.207.773	2.425.569
Tuba	4.617.855	5.391.501	6.444.873	7.921.438	10.183.252	3.337.610
B. Lampung	6.088.382	6.795.637	8.378.439	10.525.658	13.630.797	17.067.998
Metro	520.652	586.644	660.023	756.654	873.877	1.017.101

PDRB tertinggi dimiliki oleh Kota Bandar Lampung dari tahun 2004-2009, pada tahun 2009 sebesar dengan nilai Rp..17.067.998.000, tahun 2008 sebesar Rp. 13.630.797.000, tahun 2007 sebesar Rp. 10.525.658.000, tahun 2006 sebesar Rp. 8.378.439.000, tahun 2005 sebesar Rp. 6.795.637.000, tahun 2004 sebesar Rp. 6.088.382.000 , sedangkan yang memiliki nilai PDRB terendah adalah Kota Metro dari tahun 2004-2009 , pada tahun 2004 sebesar Rp. 520.652.000, tahun 2005 sebesar Rp. 586.644.000, tahun 2006 sebesar Rp. 660.023.000, tahun 2007 sebesar Rp. 756.654.000, tahun 2008 sebesar 873.877.000 dan tahun 2009 dengan nilai sebesar Rp. 1.017.101.000,-

### Dana Alokasi Umum

Dibawah ini terdapat tabel yang menunjukkan rata-rata Pendapatan Asli Daerah:

#### DAU tahun 2004-2009

##### Dalam (Rp.000)

Kab/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Lambar	149.384.000	165.705.000	259.182.000	288.264.000	325.662.015	335.371.000
Lamteng	308.268.000	331.429.000	549.303.000	599.805.000	669.102.531	669.111.784
Lamut	215.610.000	225.960.000	368.683.000	395.803.000	440.124.311	454.517.555

Lamtim	257.028.000	282.847.000	445.966.497	487.543.000	529.485.333	537.536.893
Lamsel	335.148.173	337.196.000	532.654.000	600.921.000	658.043.647	444.670.385
Tanggamus	276.650.000	285.091.000	448.288.000	495.346.000	542.094.963	567.317.219
Way Kanan	141.177.000	154.730.000	233.913.000	274.211.000	297.523.114	327.277.673
Tuba	203.812.000	224.124.000	362.113.000	400.619.000	450.771.445	464.051.063
B. Lampung	243.044.000	264.715.000	421.911.000	464.191.000	509.474.017	528.629.513
Metro	122.427.811	128.166.080	178.609.000	203.947.811	209.739.407	227.345.552

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir semua Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung mengalami peningkatan DAU setiap tahunnya. Dua tahun berturut-turut (2004-2005) penerimaan DAU tertinggi di peroleh kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 335.148.173.000 dan Rp. 337.196.000.000, tahun 2006 diperoleh kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 549.303.000.000, tahun 2007 diperoleh kembali kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 600.921.000.000, DAU tertinggi di peroleh kembali oleh kabupaten Lampung Tengah selama dua tahun berturut-turut (tahun 2008-2009) sebesar Rp. 669.102.531.000 dan Rp. 669.111.784.000. Sedangkan untuk nilai terendah DAU dari taun 2004-2009 yaitu dimiliki oleh Kota Metro, karena Kota Metro merupakan kota kecil yang perekonomiannya sangat stabil sehingga kurang mendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan Dana Transfer dari pusat.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Dibawah ini terdapat tabel yang menunjukkan rata-rata Pendapatan Asli Daerah:

#### **PAD tahun 2004-2009 Dalam (Rp.000)**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Lambar	4.954.463	6.197.941	11.215.887	12.341.413	17.198.782	11.579.000
Lamteng	10.197.328	11.101.704	14.215.610	11.726.363	22.837.755	24.471.465
Lamut	8.402.191	8.489.554	11.406.389	15.307.800	16.531.831	11.794.023

Lamtim	7.291.965	7.499.519	16.137.121	30.311.592	26.645.226	18.821.941
Lamsel	13.265.862	15.937.350	19.101.375	24.459.293	25.572.135	25.030.107
Tanggamus	7.000.000	10.872.112	15.038.624	13.139.814	15.314.297	12.772.433
Way Kanan	2.309.951	2.585.982	8.550.638	12.026.213	14.476.074	11.481.911
Tuba	5.173.971	5.313.907	8.340.166	19.763.703	10.437.542	11.396.155
B. Lampung	36.689.576	46.513.716	46.137.259	53.714.915	67.661.519	70.432.263
Metro	10.511.497	12.899.125	17.643.355	20.098.524	19.980.633	21.060.410

Berdasarkan tabel diatas penerimaan PAD tertinggi dari tahun 2004 sampai tahun 2009 di peroleh Kota Bandar Lampung, karena Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dari Propinsi Lampung dengan perekonomiannya lebih maju dan pendapatannya lebih tinggi di bandingkan di daerah-daerah lainnya. Sedangkan penerimaan PAD terendah oleh Kabupaten Way kanan pada tahun 2004 yaitu Rp. 2.309.951.000 dan tahun 2005 Rp. 2.585.982.000, pada tahun 2006 diperoleh Kabupaten Tulang Bawang Rp. 8.340.166.000, pada tahun 2007 diperoleh Kabupaten Lampung Tengah Rp. 11.726.363.000 dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2008 dan 2009 terjadi pada kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 10.437.542.000 dan Rp. 11.396.155.000. Kabupaten Tulang Bawang sering mengalami penurunan dikarenakan terjadi pemekaran di wilayah daerah Tulang Bawang tersebut.

### Uji Normalitas

Dalam penggunaan regresi linear berganda, terdapat beberapa uji persyaratan yang sangat ketat yang biasa disebut uji asumsi klasik. Dalam melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik parametrik, khususnya dalam penggunaan statistik regresi linear ganda diperlukan persyaratan yaitu setiap variabel penelitian harus diuji normalitasnya. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal.

### Uji Normalitas Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah



### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.01302248E7
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.699
Asymp. Sig. (2-tailed)		.713
a. Test distribution is Normal.		

Dari hasil test diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

### Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui apakah model regresi linear berganda yang dihasilkan tidak terjadi autokorelasi, dilakukan uji *Durbin-Watson* (uji DW) dengan kriteria jika  $d_U < d < 4 - d_U$  maka tidak ada autokorelasi positif atau negative (Ghozali, 2009).

### Hasil Uji Durbin Watson Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.689 <sup>a</sup>	.475	.447	1.040E7	1.820

a. Predictors: (Constant), DAU, Belanja Modal, PDRB

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji DW untuk Belanja Modal PDRB dan DAU terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu  $1,520 < 1,820 < 2,48$ , dengan demikian disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif.

### Uji Multikolinearitas

Suatu model regresi linear berganda yang baik tidak terjadi multikolinearitas karena jika adanya hubungan multikolinearitas antarvariabel independen akan menimbulkan kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

### Hasil Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Belanja Modal	.724	1.380
	PDRB	.402	2.488
	DAU	.331	3.019

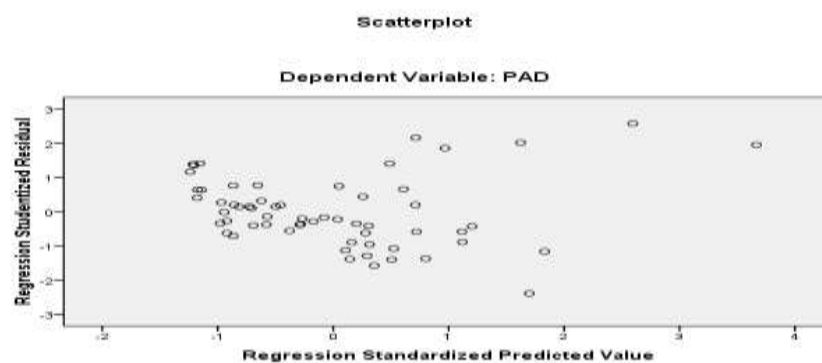
a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 (10%) yang berarti bahwa korelasi antar masing-masing variabel bebas nilainya kurang dari 95% dan hasil dari perhitungan *varian inflation factor* (VIF) menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

### Uji Heteroskedastisitas

Gejala heterokedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplot seperti dibawah ini:

### Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa scatterplot untuk pendapatan asli daerah menyebar secara acak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dan penelitian ini layak untuk diteliti.

### Pengujian Model

#### Hasil Uji F (ANOVA)

##### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.476E15	3	1.825E15	16.882	.000 <sup>a</sup>
	Residual	6.055E15	56	1.081E14		
	Total	1.153E16	59			

a. Predictors: (Constant), DAU, Belanja Modal, PDRB

b. Dependent Variable: PAD

Nilai signifikansi F variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah yaitu  $0,00 < 0,05$ .  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu sebesar  $16,882 > 2,77$  dengan  $df_1 = 3$   $df_2 = 56$ . Sehingga disimpulkan terdapat pengaruh antara belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah.

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.689 <sup>a</sup>	.475	.447	1.040E7

a. Predictors: (Constant), DAU, Belanja Modal, PDRB

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel diatas nilai R sebesar 0,689 dan  $R^2$  sebesar 0,475. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal, PDRB, dan DAU terhadap PAD sebesar 0,689 dan 47,5% Belanja Modal, PDRB dan DAU dipengaruhi oleh PAD. Sedangkan sebesar 52,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji-t)

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.370E6	3.700E6		1.992	.051
Belanja Modal	.034	.027	.143	1.254	.215
PDRB	3.458	.597	.885	5.796	.000
DAU	-.030	.016	-.324	-1.925	.059

a. Dependent Variable: PAD

Pengujian ini dilakukan untuk menjawab hipotesis secara parsial. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji-t pada tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5% dengan ketentuan:

1.  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
2.  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
3. Signifikansi (Sig.)  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
4. Signifikansi (Sig.)  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Berdasarkan maka hasil uji hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada tabel diatas diketahui bahwa pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dengan melihat nilai probabilitas (Sig) variabel belanja modal berjumlah  $0,215 > 0,05$ . Jika dilihat dari  $t_{hitung}$  sebesar 1,254,  $t_{tabel}$  sebesar 1,67 dengan  $df_2 = 56$ , maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$ . Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada tabel diatas diketahui bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah dengan melihat nilai probabilitas (Sig) variabel pertumbuhan ekonomi berjumlah  $0,000 < 0,05$ . Jika dilihat dari  $t_{hitung}$  sebesar 5,796,  $t_{tabel}$  sebesar 1,67 dengan  $df_2 = 56$ , maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

### 3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada tabel diatas diketahui bahwa pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah dengan melihat nilai probabilitas (Sig) variabel dana alokasi umum berjumlah  $0,059 > 0,05$ . Jika dilihat dari  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,925$ ,  $t_{tabel}$  sebesar  $1,67$  dengan  $df_2 = 56$ , maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$ . Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

## Pembahasan

Hasil uji hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan belanja modal berpengaruh secara signifikansi terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten kota Propinsi Lampung tidak diterima artinya belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten kota Propinsi Lampung. Hasil penerimaan hipotesis nol ( $H_{01}$ ) menunjukkan bahwa bukti empiris menolak hipotesis alternatif ( $H_{a1}$ ) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang diperoleh lebih besar dari  $0,05$  yaitu  $0,215$ . Hal ini juga dapat dilihat dari output yang dihasilkan dengan menggunakan uji t yang menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan.

Dengan demikian, setiap perubahan pendapatan asli daerah tidak dipengaruhi oleh belanja modal. Karena pelayanan publik cenderung tidak memiliki responsibilitas. Banyak contoh yang ditemukan bahwa pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas sosial, dan berbagai pelayanan jasa dikelola pemerintah tidak memuaskan masyarakat.

Hasil uji hipotesis kedua yang dinyatakan dalam notasi ( $H_2$ ) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten kota Propinsi Lampung yaitu diterima, berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten kota Propinsi Lampung. Hasil penolakan hipotesis nol ( $H_{02}$ ) menunjukkan bahwa bukti empiris menerima hipotesis alternatif ( $H_{a2}$ ) menyatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, karena hasil signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00. Hal ini juga dapat dilihat dari output yang dihasilkan dengan menggunakan uji t yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ . Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan daerah. Dengan demikian semakin tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil uji hipotesis ketiga yang dinyatakan dalam notasi ( $H_3$ ) bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten kota Propinsi Lampung tidak diterima artinya dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penerimaan hipotesis nol ( $H_{01}$ ) menunjukkan bahwa bukti empiris menolak hipotesis alternatif ( $H_{a1}$ ) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, karena hasil signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05 yaitu 0,059. Hal ini juga dapat dilihat dari output yang dihasilkan dengan menggunakan uji t yang menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan. Hal ini bisa saja terjadi karena ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum . Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum penelitian ini berhasil menemukan bahwa:

1. Belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti kurangnya kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat menyebabkan masyarakat sulit untuk membayar pajak dan retribusi daerah sehingga menghambat peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti semakin tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Daerah yang pertumbuhannya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD).
3. Dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Priyo Hari 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah* (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali). Simposium nasional akuntansi 9 padang.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPF. Yogyakarta.
- David Harianto dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Frelistiyani, Winda. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening* (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kota Se-Jawa pada Tahun 2006-2008. Universitas Diponegoro. Semarang.

- 2004 - 2009. Statistik Keuangan Daerah Propinsi Lampung Tahun 2004. Biro Pusat Statistik Lampung.
- Gozali, Imam. 2009. *Ekonometrika “Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat Patria. Jakarta.
- Indriantoro, Nur & Supomo Bambang. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. BPF. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. \_\_\_\_\_. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Rusman, Teddy. 2008. *Aplikasi Statistik Penelitian Dengan SPSS Edisi Revisi*. Bandar Lampung.
- Romian, Apriyadi. 2008. *Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/kota Propinsi Lampung*. Unila. Bandar Lampung
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit CV Alfabeta Bandung.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Syaiful. 2006. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga.
- Septian, Gunawan Wahyudi. 2008. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Verlyanto. 2009. *Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Kota Se-Propinsi Lampung)*. Unila. Bandar Lampung.